

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder merupakan pihak yang mempunyai kepentingan baik dengan pihak internal maupun eksternal yang saling berhubungan dan bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi. *Stakeholder* terdiri dari karyawan, masyarakat, negara, *supplier*, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain-lain. Namun, teori *stakeholder* berpendapat bahwa ada pihak lain yang terlibat, yaitu lembaga pemerintah, kelompok politik, asosiasi perdagangan, masyarakat, pekerja prospektif, pelanggan prospektif dan publik secara umum. Kadang pesaing pun dapat terhitung sebagai *stakeholder* (Rochmi, 2007 dalam Handayani, 2010).

Peran *stakeholders* pada perusahaan sangat berpengaruh untuk mempengaruhi dan menjadikan pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi di laporan keuangan suatu perusahaan. *Stakeholders* menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama bagi perusahaan karena *stakeholder* merupakan pemegang posisi yang kuat dalam perusahaan. *Stakeholders* pada dasarnya dapat mempengaruhi penggunaan berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.

2. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajer. *Agency relationship* merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai prinsipal atau pemberi amanat dan pihak kedua disebut agen yang bertindak sebagai perantara yang mewakili prinsipal dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Pada *agency theory* yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Teori agensi merupakan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan agen guna menghasilkan perjanjian atau kontrak. Dengan ini pemilik ingin mengetahui informasi dan aktifitas manajemen terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban perusahaan terkait dengan kinerja manajer. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para principal, dan manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan yang tertera pada kontrak.

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi dalam kegiatan operasional pada sebuah organisasi diharuskan memperlihatkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. (Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat

menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

4. Global Reporting initiative's (GRI)

Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya (www.globalreporting.org).

GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkap dalam annual report, ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI dan terdiri dari 9 Aspek, kesembilan aspek tersebut adalah :

- a. Material
- b. Energi
- c. Air
- d. Keanekaragaman hayati
- e. Emisi, *Effluent* dan limbah
- f. Produk dan jasa
- g. Ketaatan pada peraturan
- h. Transportasi
- i. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga lingkungan.

5. *Environmental Disclosure*

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Suratno dkk, 2006). Pelaporan lingkungan hidup meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan (Zhegal dan Ahmed, 1990). Pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan bertujuan sebagai media untuk mengkomunikasikan realitas untuk mengambil keputusan ekonomi, social, dan politis (Hayuningtyas, 2007).

Environmental disclosure merupakan wujud akuntabilitas sosial pada perusahaan melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan. Masyarakat bisa memantau aktifitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya, dengan demikian perusahaan akan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

6. **Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris merupakan seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawan dalam mengelola perusahaan secara efektif. Fungsi dari dewan komisaris yakni mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen dan bertanggung jawab dalam menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawabnya

dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pengendalian intern perusahaan.

7. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Effendi, dkk 2012). “Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Alijoyo dan Zaini, dalam Sagala, 2013).

8. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris independen adalah alat untuk mengawasi perilaku manajemen guna meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Komisaris independen yaitu anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang mana dipilih secara transparan dan independen, bebas dari pengaruh yang ada kaitannya dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, memiliki integritas dan juga kompetensi yang memadai, serta dapat bertindak secara objektif dan berprinsip.

9. Leverage

Leverage merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aset perusahaan. Rasio *financial leverage* merupakan perbandingan antara kewajiban dengan total aset. Perusahaan dengan rasio *leverage* lebih tinggi akan berusaha untuk menyampaikan informasi lebih banyak sebagai alat untuk mengurangi *monitoring cost* bagi investor. Tetapi perusahaan dengan tingkat *leverage* lebih tinggi juga bergantung pada pinjaman luar negeri yang digunakan sebagai pembiayaan aset, berbeda dengan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* rendah akan menggunakan modal sendiri dalam pembiayaan asetnya. *Leverage* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan profit.

B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

a) Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Dewan komisaris sebagai organ puncak pengelolaan internal perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan. Sehingga komposisi dewan komisaris menentukan pengungkapan lingkungan. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Selain itu juga, keberadaan dewan komisaris yang

independen (*outside member board*) akan semakin menambah efektivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris yang independen umumnya merupakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kegaenan.

Hasil penelitian oleh Sun, *et.al* (2010) dan Sagala, (2013), menemukan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Peran teori *stakeholder* disini yakni ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menutup kelemahan asimetri informasi karena dengan memiliki banyak anggota dewan komisaris maka semakin banyak pula ide, pengalaman, dan adanya interaksi antar dewan komisaris yang mendukung proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut berfungsi agar di dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan tetap transparan sehingga mendapat respon yang positif dari para stakeholder-nya (Sanjaya,2013).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.

b) Hubungan antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan *Environmental Disclosure*.

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound, 1995 dalam Effendi *et al.*, 2012). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi Choiriyah (2010) dan Uwuigbe *et.al.* (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe, *et.al* (2011) dan Ariningtika, dkk (2013), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif Signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun penelitian ini bertentangan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk (2012), dan Sagala, (2013), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholder yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (stakeholder) mengenai kinerja lingkungan perusahaan merupakan perwujudan dari asas transparansi. Hasil ini sejalan dengan

hasil dari Uwuigbe et al. (2011) dan Suhardjanto dan Permatasari (2010), yang menunjukkan bahwa fungsi dari dewan komisaris independen dapat mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunannya..

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

c) **Hubungan antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure***

Tujuan dari rapat dewan komisaris adalah untuk mengarahkan dan mengevaluasi aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan juga rapat dewan komisaris harus dilakukan secara berkala agar dapat memantau aktifitas yang berhubungan dengan *environmental disclosure*.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan hubungan keagenan sebagai kontrak di antara *principal* (pemegang saham) dan agen (manajer) dimana *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ujiyantho,

2007). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Maka dari itu pentingnya rapat dewan komisaris agar dapat mendiskusikan tentang kebijakan perusahaan agar lebih efektif di masa yang akan datang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Brick dan Chidambaran, 2007 dalam Suhardjanto dan Permatasari, 2010), semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, maka fungsi pengawasan dewan komisaris semakin efektif dan juga pengungkapan lingkungan pada perusahaan semakin luas. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Zulaikha, (2012), dan Ariningtika, dkk (2013) Menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk (2012) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

d) Hubungan antara *Leverage* dengan *Environmental Disclosure*.

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Karina, 2013). Perjanjian terbatas seperti perjanjian utang yang tergambar dalam tingkat *leverage* dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Jensen and Meckling, 1976; Smith and Warner, 1979 dalam Belkaoui and Karpik, 1989).

Semakin besar *environmental disclosure* maka semakin besar dapat mempengaruhi *leverage* perusahaan tersebut. Melalui *environmental disclosure* masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan memperoleh perhatian dan kepercayaan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap dipercaya.

Hasil pengujian mendukung berlakunya teori legitimasi, yaitu teori yang menjelaskan adanya suatu kontrak sosial antara perusahaan dengan para stakeholder-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Deegan (2002) dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela atau menutupnutupi laporan aktifitasnya sesuai dengan baik atau buruknya tingkat *environmental performance* perusahaan dan hal ini dapat memperlemah atau memperkuat fungsi pengawasan dari *corporate governance*.

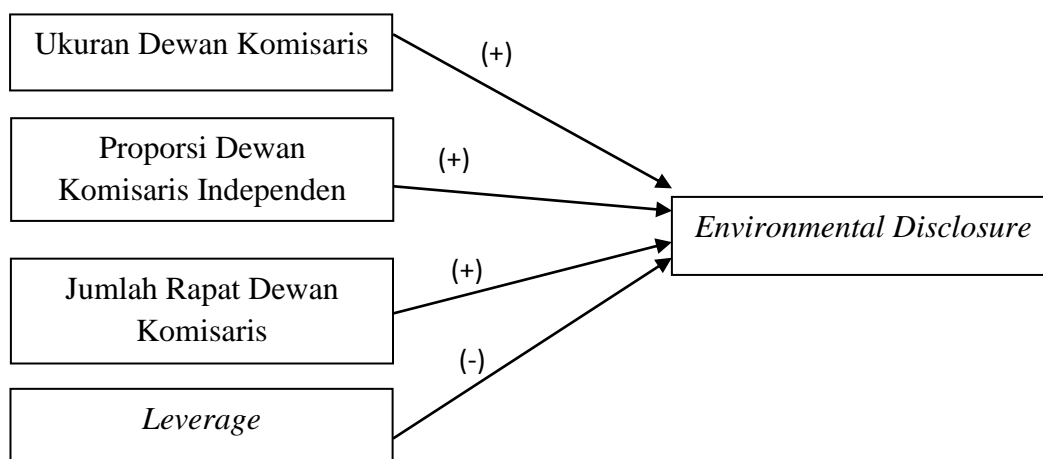
Penelitian yang dilakukan oleh Cormier dan Magnan (2003) menemukan bahwa adanya pengaruh antara *leverage* dan *environmental disclosure*.

Paramitha (2014) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa *leverage* berpengaruh signifikan atas *environmental disclosure*. Maka semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin rendah pula tingkat pengungkapan informasi terkait lingkungannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Desain Penelitian